

LOK.PPM.18

L O K A K A R Y A

PENGEMBANGAN PROGRAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DAN
EVALUASI KULIAH KERJA NYATA IPB
BOGOR, 21-22 DESEMBER 1988

PENGALAMAN EMPIRIK KERJASAMA IPB DALAM
PELAYANAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEDESAAN

Oleh

BAPPEDA KABUPATEN DT II BOGOR

PENYELENGGARA

LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

1988

PENGALAMAN EMPIRIK
KERJASAMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR DALAM
PELAYANAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEDESAAN 1)

Oleh

BAPPEDA KABUPATEN DT II BOGOR

PENDAHULUAN

Secara geografis wilayah Kabupaten Dati II Bogor terletak diantara $6^{\circ}19'$ - $6^{\circ}47'$ Lintang Selatan dan antara $106^{\circ}21'$ - $107^{\circ}13'$ Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, DKI Jakarta dan Bekasi, sebelah Timur dengan Kabupaten Karawang, sebelah Selatan dengan Kabupaten Sukabumi dan Cianjur serta sebelah Barat dengan Kabupaten Lebak dan di Tengah-tengah dengan Kotamadya Bogor.

Luas wilayah Kabupaten Bogor adalah 344.072 Ha dan secara administratif pemerintahan dibagi menjadi 6 wilayah Pembantu Bupati dan satu Kota Administratif Depok dengan 29 Kecamatan dan 520 Desa serta 10 Kelurahan.

Jumlah Penduduk sampai dengan tahun 1987 adalah 3.198.445 jiwa dengan perincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.600.026 jiwa dengan penduduk perempuan sebanyak 1.598.419 jiwa.

1) Disampaikan pada Lokakarya Pengembangan Program Pengabdian Pada Masyarakat dan Evaluasi KKN IPB, tanggal 21-22 Desember 1988, di LPPM IPB Bogor.

Berbagai usaha telah dilaksanakan mulai pada Pelita I dengan beberapa Kebijakan Pembangunan Desa dan pada Pelita IV telah dituangkan beberapa Kebijakan yang antara lain sebagai berikut:

1. Pembangunan Desa dikaitkan dengan pembangunan kota-kota kecil dan sedang yang dapat mempengaruhi daerah sekitarnya sebagai pengumpul hasil-hasil produksi maupun penyaluran kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, dengan demikian pembangunan desa merupakan bagian integral daripada pembangunan daerah.
2. Pembangunan desa dilaksanakan dalam imbang yang serasi antara Pemerintah dan masyarakat sehingga pembangunan desa dapat menggerakkan masyarakat desa untuk berpartisipasi baik dalam perencanaan, pelaksanaan pemanfaatan hasil serta penilaian hasil-hasilnya. Untuk itu perlu penyempurnaan struktur dan peningkatan aparatur Pemerintah Desa dengan memfungsikan LKMD agar lebih mampu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan memberikan bantuan bimbingan yang terus-menerus pada Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
3. Dalam menyusun program-program pembangunan desa perlu disesuaikan dengan kebutuhan setempat dengan menggerakkan dan memanfaatkan sumberdaya manusia serta daya dukung lingkungan.
4. Dalam Pembangunan Desa perlu lebih memperhatikan daerah

terbelakang, daerah minus, daerah rawan dan daerah padat penduduk.

5. Pembangunan Desa dikaitkan dengan perluasan kesempatan kerja baik di sektor pertanian dengan intensifikasi pertanian maupun di sektor lainnya terutama industri kecil dan industri kerajinan seperti kerajinan rakyat untuk menambah penghasilan.
6. Program pengembangan perkoperasian dalam kaitan pembangunan desa perlu mendapat perhatian dan diutamakan pembangunan usaha KUD.

Sejalan dengan pokok-pokok kebijakan tersebut, langkah-langkah kegiatan pembangunan desa dilaksanakan dengan:

- Mengembangkan dan meningkatkan kegiatan usaha masyarakat secara terpadu di bidang pertanian yang meliputi pertanian pangan, perkebunan, perikanan, peternakan serta bidang-bidang lain seperti industri kecil dan kerajinan rakyat. Dalam hal ini dilibatkan secara langsung para generasi muda dan wanita di desa-desa.
- Penelitian wilayah pedesaan untuk mengetahui potensi masing-masing wilayah, penyusunan program terpadu yang sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah yang bersangkutan.
- Peningkatan pelaksanaan usaha keluarga berencana (KB) serta imigrasi ke luar melalui program transmigrasi.
- Peningkatan keterampilan penduduk khususnya para generasi muda agar dapat mengembangkan kewiraswastaan di desa

sebagai kader pembangunan yang dapat mengolah potensi-potensi yang tersedia.

- Pelaksanaan pemugaran perumahan dan lingkungan hidup.
- Menimbulkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dalam rangka pengembangan desa sebagai unsur KUD oleh Badan Pembimbing dan Pelindung KUD baik dalam sektor Pertanian, Industri kecil dan rumah tangga serta perdagangan sehingga dapat memperluas kesempatan kerja.
- Melaksanakan pembinaan UDKP sebagai suatu sistem pembangunan desa secara menyeluruh dan terpadu ditingkat Kecamatan.

Dalam pelaksanaan langkah-langkah kegiatan pembangunan tersebut, salah satu usahanya adalah dengan mengadakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi di wilayah Bogor. Khusus kerjasama antar Pemerintah Kabupaten Dati II Bogor dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) sudah dimulai sejak tahun 1972. Kegiatan ini telah direalisasikan dengan berbagai bentuk kegiatan baik yang bersifat operasional berupa kegiatan terjun langsung ke lapangan (desa) yang antara lain Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktek Kerja Lapang (PKL) dan berbagai bentuk pengabdian pada masyarakat lainnya maupun kegiatan non operasional (konsepsional).

Kegiatan ini bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat cukup dapat dirasakan manfaatnya, walaupun belum sampai pada tarap yang optimal berhubung dengan berbagai masalah teknis dalam pelaksanaan dan koordinasi.

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEDESAAN

Desa secara keseluruhan merupakan landasan Ketahanan Nasional, untuk itu di dalam pembangunannya perlu memiliki suatu Lembaga yang mampu untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan di Desa. Suatu gejala dalam proses pembangunan yang akhir-akhir ini makin menonjol peranannya tidak lain adalah adanya lembaga dan organisasi masyarakat di pedesaan. Lembaga atau organisasi masyarakat yang ada di pedesaan adalah LKMD, LMD, PKK, KUD, Paguyuban KB, Kelompencapir, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lain-lain termasuk AMS yang tersebar di Propinsi Jawa Barat khususnya Kabupaten Bogor. Fungsi lembaga-lembaga tersebut pada dasarnya adalah meningkatkan taraf hidup warga desa, pengetahuan serta kesadarannya, segala keterampilan dan potensi lainnya, membudayakan sikap yang sesuai dengan teknologi, hubungan sosial dan nilai-nilai baru. Apabila semua lembaga-lembaga tersebut dapat berfungsi dengan mendinamisasikan warganya, baik individual maupun kolektif, dapat meningkatkan kapasitas desa antara lain mempertinggi produksi, mempertinggi keterampilan, mengubah pengetahuan, menjaga ketertiban dan keberhasilan, dan lain sebagainya.

Adanya lembaga dan organisasi di pedesaan sudah barang tentu perlu memenuhi persyaratan umum organisasi modern dalam masyarakat kompleks. Pertama, ada kepemimpinan yang mempunyai pengaruh untuk mengerahkan dan mengajak para

anggota secara kolektif melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Disini pemimpin perlu berpengetahuan cukup ada informasi yang memadai, mendapat kepercayaan penuh para anggota, penuh inisiatif dan dinamis kepribadiannya.

Program kerja dari lembaga atau organisasi di pedesaan meliputi beraneka-ragam aktivitas dalam pelbagai bidang yang mempunyai relevansinya dengan pembangunan pedesaan, antara lain pertanian, peternakan, kerajinan, industri kecil, sosial, latihan-latihan keterampilan, teknologi menengah, koperasi, penyuluhan/penerangan umum dan lain sebagainya.

Oleh karena itu kerjasama dengan Lembaga Perguruan Tinggi khususnya Institut Pertanian Bogor dalam pelaksanaannya di lapangan (desa), tidak bisa lepas dari keberadaan Lembaga-lembaga dan organisasi pedesaan tersebut, karena lembaga dan organisasi inilah yang merupakan wadah untuk menyampaikan program-program yang akan dilaksanakannya.

PENGALAMAN EMPIRIK KERJASAMA IPB DALAM PELAYANAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI PEDESAAN

Sebagai mana telah dijelaskan pada Bab I, bahwa kerjasama Pemerintah Kabupaten Dati II Bogor dengan IPB telah dilaksanakan sejak tahun 1972 dan telah direlisir dengan berbagai kegiatan baik non operasional maupun operasional di pedesaan.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

1. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa IPB, apabila

kita menyimak tujuan pelaksanaan KKN adalah:

- a. Agar para mahasiswa lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dalam tuntutan pembangunan.
- b. Agar para mahasiswa lebih menghayati permasalahan.
- c. Membantu Pemerintah dalam mempercepat gerak pembangunan dan mempersiapkan kader-kader pembangunan di pedesaan.

Dari ketiga tujuan pelaksanaan KKN tersebut di atas jelas bahwa secara umum para mahasiswa peserta KKN itu dituntut untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada di desa-desa lokasi pelaksanaan KKN. Dilain pihak Pemerintah Daerah ingin desa-desa yang dijadikan lokasi KKN itu adalah desa-desa yang masih perlu dipacu pertumbuhannya.

Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa program KKN di desa yang dilaksanakan selama ini selalu melibatkan lembaga-lembaga dan organisasi di desa, antara lain:

- a. Membantu PKK dalam penimbangan bayi, membuat/memberi contoh untuk pengadaan Apotik Hidup, keterampilan, kesehatan masyarakat terutama gizi.
- b. Membina pemuda melalui Karang Taruna dalam menumbuhkan kreativitas dan sportivitas pemuda melalui Olah Raga, Kesenian, Bhakti Sosial.
- c. Membantu Desa dengan LKMD-nya dalam kelengkapan/keter-tiban administrasi Desa, lomba-lomba Desa dalam rangka peringatan Hari-hari Besar/Bersejarah.

d. Penyuluhan-penyuluhan Pertanian dengan pembuatan demplot-demplot.

Namun program KKN selama ini sifatnya hanya temporer saja, demikian juga pemilihan lokasinya masih dititik beratkan pada keinginan mahasiswa/pihak Perguruan Tinggi, hal ini berkaitan dengan dana dan program KKN itu sendiri yang selama 3 tahun terakhir ini memasukkan program profesi bagi mahasiswa yang KKN.

2. Berbagai Penelitian yang dilaksanakan oleh LPPM IPB meliputi:

a. Kegiatan penelitian pengembangan desa terpadu di Desa Tapos Kecamatan Parungpanjang, sedangkan tujuan penelitian tersebut dilaksanakan dalam rangka mempercepat pemerataan pengembangan wilayah.

Dari pengamatan secara singkat ternyata wilayah kecamatan tersebut aktivitas pertaniannya masih terbelakang, tingkat ekonomi sosial/penduduk umumnya rendah, serta kondisi alam yang kurang mendukung terhadap upaya peningkatan pendapatan dari sektor pertanian.

Salah satu faktor yang menguntungkan kecamatan ini yakni walaupun jauh dengan Ibukota Kabupaten Bogor tetapi relatif dekat dengan Kabupaten Tangerang dan Jakarta sehingga mudah bagi penduduknya untuk mencari nafkah tiap hari ke kedua kota tersebut. Sedangkan

faktor yang mendukung kemudahan tadi adanya lintasan Kereta Api dan prasarana lainnya.

Pengaruh yang sudah terasa hadir dalam pelaksanaan program desa terpadu di masyarakat khususnya Desa Tapos adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat. Namun kesadaran seperti ini belum memberi dorongan secara seragam untuk mau memanfaatkan potensi wilayah, hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang membatasinya seperti tingkat produksi yang relatif masih rendah, tingkat pendapatan yang rendah dan sebagainya.

Kegiatan penelitian dapat tanggapan positif dari masyarakat, dan Kepala Desa sebagai tokoh pilihan masyarakat dapat lebih mengembangkan potensi pribadinya dalam rangka mengendalikan tanggapan negatif terhadap pelaksanaan Program pelaksanaan Desa Terpadu di Tapos.

- b. Penelitian dalam rangka penyusunan RUTR Wilayah Wisata Alam Gunung Salak Endah (GSE). Kecamatan Cibungbulang memiliki objek wisata yang potensial berupa pemandangan alam, sosial budaya dan sejarah hingga saat ini potensi yang besar tersebut belum seluruhnya dimanfaatkan mengingat masih adanya keterbatasan-keterbatasan baik dalam perencanaan maupun pengelolaannya.

Bogor letaknya berdekatan dengan Jakarta, pada saat ini terdapat suatu kecenderungan pariwisata mengarah pada wisata alam, kerjasama LPPM IPB dimaksudkan untuk mengembangkan potensi-potensi wisata alam yang ada

seperti Lansekap alam, kawah, sumber air panas, air terjun, hutan, dan peninggalan sejarah.

Disamping itu penelitian ini diharapkan juga dapat menentukan alternatif warga memahami keselarasan hubungan antara kehidupan manusia dan lingkungannya melalui upaya pemanfaatan potensi alam dengan mempertimbangkan aspek kelestarian alam lingkungannya, kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat.

Kegiatan penelitian sampai saat ini baru melaksanakan kegiatan pendataan serta menemukan berbagai permasalahan.

Dengan penelitian ini diharapkan wilayah pengembangan wisata alam GSE dapat tertata dengan sebaik mungkin yang tentunya adanya pengendalian sejak awal untuk tetap mempertahankan lingkungannya.

- c. Penelitian analisa input-output dalam rangka penyusunan Repelita V Kabupaten Dati II Bogor, pada dasarnya penelitian ini hasilnya sangat penting untuk bahan kajian dalam rangka penyusunan Repelita V Pemerintah Daerah mengharapakan melalui penelitian dapat diperoleh penajaman berbagai program sektoral untuk memantapkan arah kebijaksanaan Pembangunan Daerah melalui program Sektoral selama Pelita V.

KESIMPULAN/SARAN

1. KKN Mahasiswa IPB sifatnya adalah temporer. Disarankan agar kegiatan KKN lebih bersifat suatu kegiatan yang memerlukan pembinaan berkelanjutan.
2. Penentuan lokasi KKN masih belum merata/tersebar. Disarankan agar dalam penentuan lokasi lebih ditingkatkan koordinasi sejak awal.
3. KKN sangat diperlukan untuk membantu memotivasi masyarakat desa dalam membangun. Disarankan agar kerjasama dalam bentuk KKN tetap dilanjutkan.
4. Penelitian Program Pembangunan di Desa Tapos Kecamatan Parungpanjang telah menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membangun.
5. Mengingat banyaknya segi positif dari kerjasama antara IPB dan Pemda maka perlu adanya kelanjutan kerjasama ini terutama dalam koordinasi perencanaan sehingga menghasilkan manfaat bagi IPB dan Pemda Kabupaten Bogor.

PENUTUP

Demikianlah makalah ini disajikan dengan segala keterbatasan yang ada tentunya tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Melalui forum ini diharapkan adanya saran tindak atas hasil telaahan yang lebih mendalam ditinjau dari berbagai aspek.

KEPUSTAKAAN

1. Pemerintah Kabupaten Dati II Bogor, Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Bogor, tahun 1984.
2. Drs. MARSONO, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, tahun 1980.
3. Kantor Bangdes Kabupaten Dati II Bogor, Himpunan Ketentuan tentang LKMD tahun 1987/1988.
4. Tim LPPM IPB; Laporan Kemajuan Bantuan Pemantauan Pelaksanaan hasil pembangunan desa terpadu di Parungpanjang, tahun 1988.
5. Tim LPPM IPB; Laporan Kemajuan Studi Penyusunan RUTR, Penyusunan RUTR pengembangan Pariwisata Alam Gunung Salak Endah Kabupaten Bogor, tahun 1988.
6. Badan Kerjasama Kuliah Kerja Nyata (BKS-KKN) Perguruan Tinggi se Jawa Barat; Koordinasi Pengembangan dan Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata Perguruan Tinggi se Jawa Barat, tahun 1985.